Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 6 Tahun 2026

PEMBERDAYAAN PEMUDA BERBASIS GERAKAN SOSIAL MAHASISWA: PROGRAM LITERASI DEMOKRASI GMNI DI KOTA KUPANG

Ayub Rivan Faot[1], Bertilia Helena Bhoki[2], Putri Yosina Kolo Wijaya[3], Yuni Sutrianti Lobo[4], Lasarus Jehamat[5], Helga M. Evarista Gero[6], Hoiril Sabariman[7]
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
Email : faotfeki711@gmail.com, mabutellen563@gmail.com, putrikollowijaya@gmail.com, yunisutriantilobo30@gmail.com, lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id, gerohelga26@gmail.com, hoiril.sabariman@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Keterlibatan mahasiswa dalam aksi demonstrasi merupakan bagian penting dari demokrasi partisipatif, namun sering dihadapkan pada stigma negatif akibat rendahnya literasi demokrasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Kupang mengenai demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara serta strategi penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan meliputi diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan studi kasus terhadap praktik demonstrasi di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap landasan hukum demonstrasi, fungsi kontrol sosial dalam demokrasi, serta pentingnya etika dalam kebebasan berekspresi. Program ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas politik mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan mendorong praktik demonstrasi yang lebih tertib, argumentatif, dan berorientasi pada perubahan kebijakan.

Kata kunci: literasi demokrasi, demonstrasi, mahasiswa, GMNI, partisipasi politik

ABSTRACT

Student involvement in demonstrations is a vital component of participatory democracy, yet it is often burdened by negative stigma due to limited democratic literacy. This community service program aimed to enhance the understanding of activists from the Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Kupang regarding demonstrations as a constitutional right and responsible advocacy strategies. The methods employed included interactive discussions, question-and-answer sessions, and case studies of demonstration practices in Indonesia. The results indicate an improvement in participants' understanding of the legal foundations of demonstrations, their role as social control mechanisms in democracy, and the importance of ethical expression. This program contributes to strengthening students' political capacity as agents of social change and promotes more orderly, argumentative, and policy-oriented demonstrations.

Keywords: *democratic literacy, demonstration, students, GMNI, political participation*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234.KK.443
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Keterlibatan aktif pemuda dalam proses politik merupakan salah satu indikator fundamental yang mencerminkan kualitas dan keberlanjutan demokrasi dalam suatu negara. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, pemuda tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan politik, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas kritis untuk mengawasi kekuasaan, mengartikulasikan kepentingan publik, serta mendorong perubahan sosial secara konstruktif. Di Indonesia, peran pemuda—khususnya mahasiswa—memiliki akar historis yang kuat dalam dinamika politik nasional. Sejumlah peristiwa penting, mulai dari pergerakan kemerdekaan, reformasi 1966, hingga reformasi 1998, menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa kerap menjadi katalis perubahan sosial dan politik yang signifikan (Asykarullah, 2016).

Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling nyata dan sering digunakan oleh mahasiswa adalah demonstrasi sebagai sarana penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi tidak hanya berfungsi sebagai medium ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Secara normatif, hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 serta diperkuat oleh berbagai regulasi turunan. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan ruang demokrasi ini seringkali menghadapi tantangan, baik dari aspek pemahaman hukum, strategi penyampaian aspirasi, maupun penerimaan publik.

Dalam konteks lokal Kota Kupang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Kupang merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang secara konsisten terlibat dalam aksi-aksi sosial dan politik. GMNI aktif merespons isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan publik, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, baik pada level daerah maupun nasional (Setyoko & Satria, 2020). Aktivisme GMNI menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa tetap memainkan peran penting dalam menjaga dinamika demokrasi di daerah. Namun demikian, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, termasuk oleh GMNI, tidak jarang dihadapkan pada stigma negatif dari sebagian masyarakat. Demonstrasi kerap dipersepsikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum, menciptakan keresahan, atau bahkan diasosiasikan dengan tindakan anarkis, meskipun secara hukum merupakan hak konstitusional warga negara (Djou et al., 2022).

Stigma tersebut tidak hanya berimplikasi pada legitimasi gerakan mahasiswa di mata publik, tetapi juga berpotensi melemahkan substansi demokrasi itu sendiri. Ketika demonstrasi dipahami secara sempit sebagai gangguan sosial, maka esensi partisipasi politik dan kebebasan berekspresi berisiko tereduksi. Di sisi lain, tantangan juga muncul dari internal gerakan mahasiswa. Berdasarkan hasil diskusi mendalam dengan pengurus GMNI DPC Kupang, teridentifikasi bahwa sebagian anggota belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum demonstrasi, prinsip-prinsip demokrasi, serta strategi advokasi yang efektif dan bertanggung jawab. Pemahaman terhadap substansi Pasal 28 UUD 1945 dan implikasinya dalam praktik demokrasi sehari-hari masih bersifat parsial dan normatif, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan kolektif.

Selain aspek pemahaman hukum dan demokrasi, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan institusi pemerintah. Padahal, dalam perspektif gerakan sosial modern, efektivitas advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan membangun jejaring, mengelola wacana publik, serta menyusun strategi komunikasi politik yang berbasis pengetahuan dan etika demokrasi. Tanpa literasi demokrasi yang memadai, gerakan mahasiswa berpotensi kehilangan arah, terjebak pada pola aksi yang reaktif, dan kurang berdampak secara struktural.

Berangkat dari kondisi tersebut, program literasi demokrasi menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan kapasitas pemuda, khususnya aktivis GMNI di Kota Kupang. Literasi demokrasi

tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman terhadap aturan hukum dan prosedur politik, tetapi juga sebagai kemampuan kritis untuk membaca realitas sosial, mengartikulasikan kepentingan publik secara argumentatif, serta mengelola perbedaan dalam bingkai demokrasi yang beradab. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara hak normatif dan praktik demokrasi, dengan menekankan pada integrasi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipasi politik.

Melalui penguatan literasi demokrasi, diharapkan aktivis GMNI tidak hanya mampu menjalankan hak menyampaikan pendapat secara konstitusional, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang reflektif, inklusif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, gerakan mahasiswa dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam memperkuat demokrasi lokal di Kota Kupang, sekaligus membangun relasi yang lebih konstruktif antara masyarakat sipil, negara, dan ruang publik (Aqshadigrama, 2025).

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Sekretariat GMNI DPC Kupang pada tanggal 20 Oktober 2025. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi antara tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, dengan pengurus GMNI DPC Kupang sebagai mitra kegiatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi, metode, dan pelaksanaan kegiatan selaras dengan kebutuhan riil organisasi serta konteks sosial-politik yang dihadapi oleh aktivis mahasiswa di Kota Kupang.

Kegiatan ini melibatkan sebanyak 35 orang aktivis mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang. Para peserta merupakan kader dan anggota aktif GMNI yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan advokasi, aksi demonstrasi, serta dinamika gerakan mahasiswa di tingkat lokal. Partisipasi aktif peserta menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat pendekatan yang digunakan menekankan pada proses pembelajaran partisipatif dan dialogis.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Tahapan tersebut meliputi persiapan materi, pelaksanaan pelatihan, diskusi dan refleksi, serta evaluasi kegiatan. Setiap tahapan dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta serta memperkuat pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi dalam konteks gerakan mahasiswa.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Metode Pelatihan

Untuk mencapai tujuan kegiatan, tim pengabdian menerapkan beberapa metode pelatihan yang bersifat partisipatif dan kontekstual, yaitu sebagai berikut:

1. Diskusi Interaktif
   Metode diskusi interaktif digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami konsep demokrasi dan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengkaji secara kritis makna hak menyampaikan pendapat di muka umum, batasan-batasan hukum yang menyertainya, serta relevansinya dalam praktik gerakan mahasiswa. Setiap peserta diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan pengalaman pribadi terkait aktivitas organisasi dan aksi sosial yang pernah mereka lakukan.
2. Sesi Tanya Jawab
   Sesi tanya jawab dirancang sebagai ruang dialog terbuka antara peserta dan tim pengabdian. Melalui metode ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan mengenai aspek-aspek yang belum dipahami, baik terkait landasan hukum demonstrasi, etika penyampaian aspirasi, maupun tantangan praktis yang dihadapi dalam aktivitas organisasi. Selain itu, sesi ini juga dimanfaatkan untuk berbagi permasalahan konkret yang dialami peserta, sehingga pembahasan menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan realitas lapangan.
3. Studi Kasus
   Metode studi kasus digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta melalui analisis empiris terhadap praktik demonstrasi di Indonesia. Tim pengabdian menyajikan beberapa contoh kasus demonstrasi, baik yang berhasil memengaruhi kebijakan publik maupun yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Peserta kemudian diajak untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan demonstrasi tersebut, seperti strategi komunikasi, dukungan publik, kepatuhan terhadap koridor hukum, serta dinamika relasi antara gerakan mahasiswa dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta dalam merancang dan melaksanakan aksi yang lebih efektif, terukur, dan bertanggung jawab.

Melalui kombinasi metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai demokrasi dan kebebasan berekspresi, tetapi juga memperkuat kapasitas praktis mereka sebagai aktor gerakan mahasiswa yang sadar hukum, reflektif, dan berorientasi pada perubahan sosial yang konstruktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Demonstrasi sebagai Hak Warga Negara

Kegiatan pengabdian diawali dengan pemaparan materi mengenai landasan normatif dan konstitusional demonstrasi sebagai salah satu bentuk partisipasi politik warga negara. Narasumber menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang sah dan dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut secara eksplisit menjamin kebebasan berekspresi, berserikat, dan menyampaikan pendapat sebagai hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi. Selain itu, pemaparan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur secara lebih teknis mengenai tata cara, batasan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (Asykarullah, 2016).

Dalam sesi diskusi, Ketua DPC GMNI Kupang menekankan bahwa demonstrasi bukanlah aktivitas yang dilakukan secara serampangan atau tanpa aturan. Demonstrasi dipahami sebagai instrumen demokrasi yang digunakan ketika terdapat kebijakan atau persoalan publik yang perlu disuarakan kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa stigma demonstrasi sebagai tindakan anarkis sering kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan, karena sebagian besar aksi yang dilakukan GMNI berjalan secara tertib, damai, dan tanpa tindakan vandalisme. Pandangan ini memperkaya diskusi, khususnya ketika peserta mulai membahas persepsi publik terhadap demonstrasi.

Diskusi mengungkap bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap demonstrasi sebagian besar dibentuk oleh konstruksi media massa dan media sosial yang cenderung menonjolkan aspek sensasional. Demonstrasi yang berlangsung tertib jarang mendapatkan perhatian media, sementara aksi yang berujung ricuh justru menjadi sorotan utama. Pola pemberitaan ini secara tidak langsung membentuk citra negatif demonstrasi di mata publik. Padahal, dalam perspektif demokrasi partisipatif, demonstrasi memiliki fungsi strategis sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ketika saluran formal representasi politik tidak berjalan efektif, demonstrasi menjadi alternatif legitim bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung (Pateman, 1970).



Gambar 2. Dokumentasi Aksi Demonstrasi GMNI di Kota Kupang

Pengalaman Demonstrasi: Dari Isu Nasional hingga Lokal

Hasil diskusi menunjukkan bahwa aktivis GMNI Kupang memiliki pengalaman yang beragam dalam melaksanakan demonstrasi, baik terkait isu nasional maupun isu lokal. Salah satu pengalaman yang paling menonjol adalah keterlibatan dalam aksi penolakan rencana kenaikan tunjangan anggota DPR. Isu tersebut dipandang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah mengalami tekanan. Meskipun isu tersebut berskala nasional, dampaknya dirasakan hingga ke daerah, sehingga mendorong GMNI Kupang untuk turut menyuarakan penolakan sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap kepentingan rakyat.

Selain isu nasional, isu-isu lokal juga menjadi pemicu utama aksi demonstrasi. Salah satu contoh yang dibahas adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembatasan angkutan pick-up sebagai sarana transportasi penumpang. Kebijakan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat kecil, khususnya di wilayah kabupaten yang sangat bergantung pada moda transportasi tersebut. Demonstrasi dilakukan sebagai upaya mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

Diskusi lebih lanjut mengungkap bahwa strategi demonstrasi untuk isu nasional dan lokal memiliki perbedaan signifikan. Isu nasional umumnya memerlukan konsolidasi dan koordinasi lintas daerah untuk memperkuat tekanan politik, sedangkan isu lokal lebih menekankan pendekatan dialogis dengan pemerintah daerah serta mobilisasi dukungan masyarakat terdampak langsung (Anggoto, 2023). Narasumber menegaskan bahwa tujuan utama demonstrasi bukan sekadar menyampaikan protes, melainkan memengaruhi kebijakan publik secara konkret. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan harus dirumuskan secara jelas, rasional, dan realistis agar memiliki daya dorong politik yang kuat (Tarrow, 1998).

Tantangan yang Dihadapi Aktivis Demonstrasi

Hasil diskusi juga mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi aktivis GMNI dalam memimpin dan mengelola aksi demonstrasi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman internal mengenai konsep demokrasi dan kebebasan berekspresi. Sebagian anggota organisasi masih memaknai kebebasan berekspresi secara absolut, tanpa mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Ketua DPC GMNI Kupang mengungkapkan bahwa terdapat kasus di mana anggota menggunakan bahasa kasar dan sentimen berlebihan saat berorasi dengan dalih kebebasan berekspresi, padahal tindakan tersebut justru berpotensi merusak tujuan dan legitimasi demonstrasi (Aqshadigrama, 2025).

Selain tantangan internal, stigma negatif dari masyarakat juga menjadi hambatan serius. Demonstrasi sering diasosiasikan dengan kerusuhan, kemacetan, dan gangguan ketertiban umum. Persepsi ini menuntut aktivis untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih kreatif dan edukatif, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana klarifikasi tujuan, tuntutan, dan nilai-nilai perjuangan yang diusung. Literasi demokrasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut, karena pemahaman yang matang mengenai batasan kebebasan berekspresi akan membantu aktivis menjalankan demonstrasi secara bertanggung jawab dan berorientasi pada perubahan sosial yang konstruktif (Hutasoit, 2023).



Gambar 3. Dokumentasi Foto Bersama Peserta Kegiatan GMNI

Membangun Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pembahasan mengenai kerja sama dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa GMNI DPC Kupang bersikap terbuka terhadap kolaborasi, sepanjang kerja sama tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar organisasi. Beberapa bentuk kolaborasi yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan BEM Universitas Nusa

Cendana dalam penyelenggaraan seminar nasional serta upaya advokasi kebijakan melalui permintaan akses data kepada Inspektorat daerah (Radjab & Hariyadi, 2014).

Kerja sama dengan pemerintah daerah juga dipandang strategis karena membuka ruang dialog langsung dengan pengambil kebijakan, sehingga aspirasi dapat disampaikan secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi lintas organisasi memberikan legitimasi sosial dan politik yang lebih kuat terhadap tuntutan yang diajukan. Namun demikian, peserta juga menekankan pentingnya menjaga independensi gerakan agar kolaborasi tidak mengaburkan tujuan awal perjuangan (Alfiandri, Akbar, & Ikhsan, 2019).

Hasil dan Dampak Kegiatan

Evaluasi kegiatan menunjukkan respons yang sangat positif dari peserta. Sekitar 92% peserta aktif terlibat dalam diskusi dan menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan pengalaman lapangan mereka. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum demonstrasi, strategi penyampaian aspirasi, serta etika dalam berorganisasi. Selain itu, peserta mengusulkan adanya kegiatan lanjutan, seperti pelatihan kampanye publik, pengelolaan media sosial untuk advokasi, dan teknik negosiasi dengan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan literasi demokrasi dan politik di kalangan aktivis mahasiswa masih sangat tinggi (M.Pd et al., 2025).

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda melalui pendidikan politik dan literasi demokrasi mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Dengan pemahaman yang kuat mengenai demokrasi dan hak-hak konstitusional, aktivis mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam membangun kehidupan demokrasi yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Sukmana et al., 2025).

KESIMPULAN

Kegiatan literasi demokrasi yang dilaksanakan bersama GMNI DPC Kupang menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara memiliki dampak signifikan terhadap penguatan kapasitas politik aktivis mahasiswa. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan hukum demonstrasi, fungsi demonstrasi dalam demokrasi partisipatif, serta pentingnya etika dan tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi. Pengalaman empiris aktivis GMNI, baik dalam isu nasional maupun lokal, menunjukkan bahwa demonstrasi berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang strategis dalam memengaruhi kebijakan publik. Namun demikian, pelaksanaan demonstrasi masih dihadapkan pada tantangan internal berupa perbedaan pemahaman demokrasi serta tantangan eksternal berupa stigma negatif masyarakat. Program ini membuktikan bahwa pendidikan politik yang sistematis mampu memperkuat kesadaran demokratis, meningkatkan kualitas gerakan mahasiswa, serta mendorong praktik demonstrasi yang lebih tertib, argumentatif, dan berorientasi pada perubahan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiandri, Alfiandri, Dhani Akbar, and Khairul Ikhsan. 2019. *Collaborative governance : Suatu konsep penguatan kelembagaan dalam dunia investasi*. Umrahpress.

Anggoro, Inggit Dwi, Nazwa Awaliah, Niana Indriyana, Regita Pramesti Harianto, Siti Rahmadina, and Arita Marini. 2023. “Upaya Pembentukan Karakter Melalui Implementasi Model Demonstrasi Pada Materi IPS Kekayaan Budaya Indonesia Kelas IV.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2(12):1633–48.

Aqshadigrama, Muhammad. 2025. "Analysis of the Implementation of Political Party Information Systems (SIPOL) from a Democratic Perspective in the 2019 and 2024 General Elections: Analisis Implementasi Sistem Informasi Partai Politik Dalam Perspektif Demokrasi Pada Pemilihan Umum 2019 Dan 2024." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 11(2):107–24. doi:10.20473/jpi.v11i2.72822.

Asykarullah, Dzikri. 2016. "Gerakan Mahasiswa Dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Mengenai Peran Keluarga Mahasiswa Jurusan Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Sejati Desa, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman." Universitas Gadjah Mada.

Djou, Ana Maria Gadi, Murdaningsih Murdaningsih, Konstantinus Denny Pareira Meke, Angelina Tibo, and Ronaldus Arman Desenjaya. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nduaria Kecamatan Kelimutu Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Flores." *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(3):188–94. doi:10.37478/mahajana.v3i3.2181.

Hutasoit, Agustono. 2023. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PERUSAKAN ATAS MOBIL DALAM AKSI DEMONSTRASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021)." Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

M.Pd, Dr Andi Kaharuddin, S. Pd, Lisa Nur Maulidia, Anastasia Dewi Anggraeni M.Pd, Eko Wulandari S.Pd.I.,M.Pd, Mike Nurmalia Sari, Marlina M.Pd, Nur Hikmah, Muhamad Abu Sobirin M.Pd, Deni Melyati M.Pd, Jarudin, Musa'adatul Fithriyah M.Pd.I, Dr Siti Nurul Hidayah M.Ed M. Ed, Siwi Utaminingtyas, Uswatun Hasanah M.Pd, Hartaba, Adrianus Nasar, Nadyra Dara Budiman, Rusmiati, Wilfrida Mayasti Obina M.Si S. Pd, and Dra Helda Jolanda Pentury M.Pd. 2025. *Strategi Pembelajaran Aktif dan Kreatif*. Pt. Mifandi Mandiri Digital.

Pateman, Carole. 1970. "Participation and Democratic Theory." doi:10.1017/CBO9780511720444.

Radjab, Syamsuddin, and Ade Reza Hariyadi. 2014. *GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan*. Penerbit Nagamedia.

Setyoko, Joko, and Muhammad Deby Satria. 2020. "Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 2(1):12–24. doi:10.36355/jppd.v2i1.15.

Sukmana, Oman, Fritz Hotman S. Damanik, Godlif Sianipar, Yuliyantini Yuliyantini, Nurdahalia Lairing, Pardamean Daulay, A. Noer Chalifah Ramadhany, Sari Viciawati Machdum, Gibran Muhammad, Mujahid Widian Saragih, Mukhammad Handy Dwi Wijaya, Sony Kristiantoro, and Ridho Rinaldi. 2025. *Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Star Digital Publishing.

Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. 2nd ed. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge: Cambridge University Press.